



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Bumi Nangka-Kolonodale, Petasia, Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2024. sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, 20 Februari 2025

Inspektorat Daerah
Kabupaten Morowali Utara
INSPEKTUR



ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Morowali Utara
Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Baho'ue Kolonodale Kode Pos 94671



Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga laporan ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya, sekian dan terima kasih.

Kolonodale, 20 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



GATOT SE BUDI MANTO, S.Kom
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19761228 200604 1 002

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar	ii
2. Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan Penyusunan	2
1.4 Gambaran Umum	2
1.4.1 Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara	2
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara	3
1.4.3 Sumber Daya Aparatur.....	4
1.5 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	5
2.2 Sistematis Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	5
2.3 Visi Dan Misi Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah	6
2.3.1 Visi.....	6
2.3.2 Misi	7
2.4 Keselarasan Kinerja	8
2.5 Tujuan Dan Sasaran.....	8
2.6 Indikator Kinerja Utama	9
2.7 Cascading Kinerja.....	10
2.8 Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.....	12
3.1.1 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	13
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024	15
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Rencana Strategis	

(RENSTRA) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	
Kabupaten Morowali Utara.....	16
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	17
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
3.1.6 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	23
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	25
3.3 Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. IKU	
3. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024	
4. Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kab. Morowali Utara	
5. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37).
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah kabupaten Morowali Utara

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali utara untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan , Misi dan visi sebgaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja dinas komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Nomor 25). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowalu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37) dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komnukasi dan Informatika Daerah.

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 maka Dinas Komuikasi dan Informatika Daerah mempunyai visi misi “ Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Informatif melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien berbasis e-Government menuju Masyarakat yang Sejahtera.

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

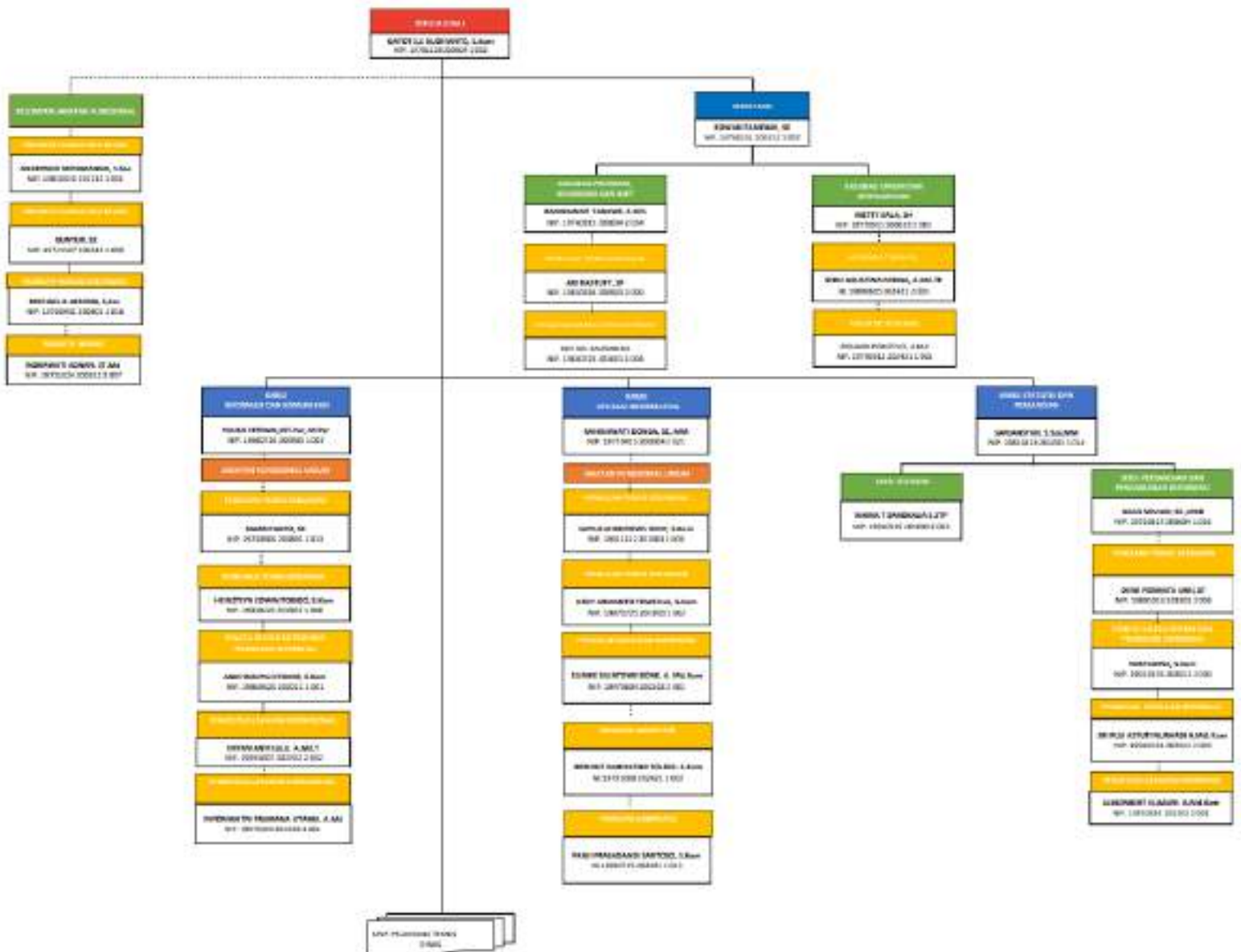
c. Bidang Aplikasi dan Informasi

d. Bidang Statistik dan Persandian 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Statistik
2. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi

e. Kelompok Jabatan Fungsional

**Tabel 1. Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara**



1.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Morowali Utara memiliki Pegawai sebanyak 49 Orang.

Dari jumlah Pegawai sebanyak 49 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III/a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 4 orang , Jabatan Fungsional Sebanyak 4 Orang, serta Pegawai Non Eselon sebanyak 18 orang. Selain Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 18 orang.

Tabel 2.
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/Non Eselon	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang		3				3
4	Kepala Seksi			4			4
5	Jabatan Fungsional				4		4
6	Staf/Non Eselon				18		18
7	Non PNS					18	18
							49

1.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparan. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good government. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Morowali Utara
2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kabupaten Morowali Utara dikarenakan keterbatasan anggaran.
3. Penyebarluasan informasi dan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (e-Gov) belum optimal.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Perbaiki berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
- b. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
- c. Perbaiki sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebaran melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis teknologi informasi e-Government.
- d. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi.

2.2. Sistematisa Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi "*Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera*".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, tentunya

perlu didukung oleh setiap OPD sesuai dengan bidang urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan guna guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (e-Gov), sehingga keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat terinformasikan kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan informasi terkait kebijakan pemerintah secara update kepada masyarakat dan menyebarluaskan melalui website yang mudah diakses.

Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

2.3.1 Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumber daya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG INFORMATIF MELALUI PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERBASIS E-GOVERNMENT MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA”

Makna dari Visi tersebut adalah :

Morowali Utara bisa sejajar dengan Daerah Maju lainnya di Kawasan Timur Indonesia, dalam artian bahwa di Tahun 2024 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan Daerah lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan Daerah lain diperlukan langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Morowali Utara.

2.3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan aplikasi informatika layanan publik dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
3. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
5. Melakukan promosi potensi daerah sebagai upaya menggalang investasi melalui informasi publik.
6. Melakukan interkoneksi informasi yang memungkinkan terlaksananya sistem komunikasi internal maupun eksternal pemerintah.
7. Melakukan standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam rangka menjamin keberhasilan proses e-government, e-planning dan e-budgeting.
8. Menyelenggarakan pelayanan prima bagi masyarakat dan internal Pemerintah Daerah melalui efektifitas dan efisiensi birokrasi serta mendekatkan pelayanan umum ke masyarakat.
9. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui sandi dan telekomunikasi dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis.
10. Melakukan penyandian atas berita yang akan di publikasikan.
11. Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian.

2.4 Keselarasan Kinerja

Misi 5	Meningkatkan Profisinalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintah Yang Baik		
	Tujuan	Terwujudnya Pemeritahan Yang Efektif dan Efisien	
	Sasaran	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	

Untuk mewujudkan Keselarasan Kinerja Renstra RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, maka disusun Matrik Keselarasan Kinerja untuk menjamin bahwa ada keterkaitan pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dengan Kinerja Kepala Daerah.

2.5 Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan . secara berkesinabungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebanyak satu sasaran strategis.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan

2.6. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026.

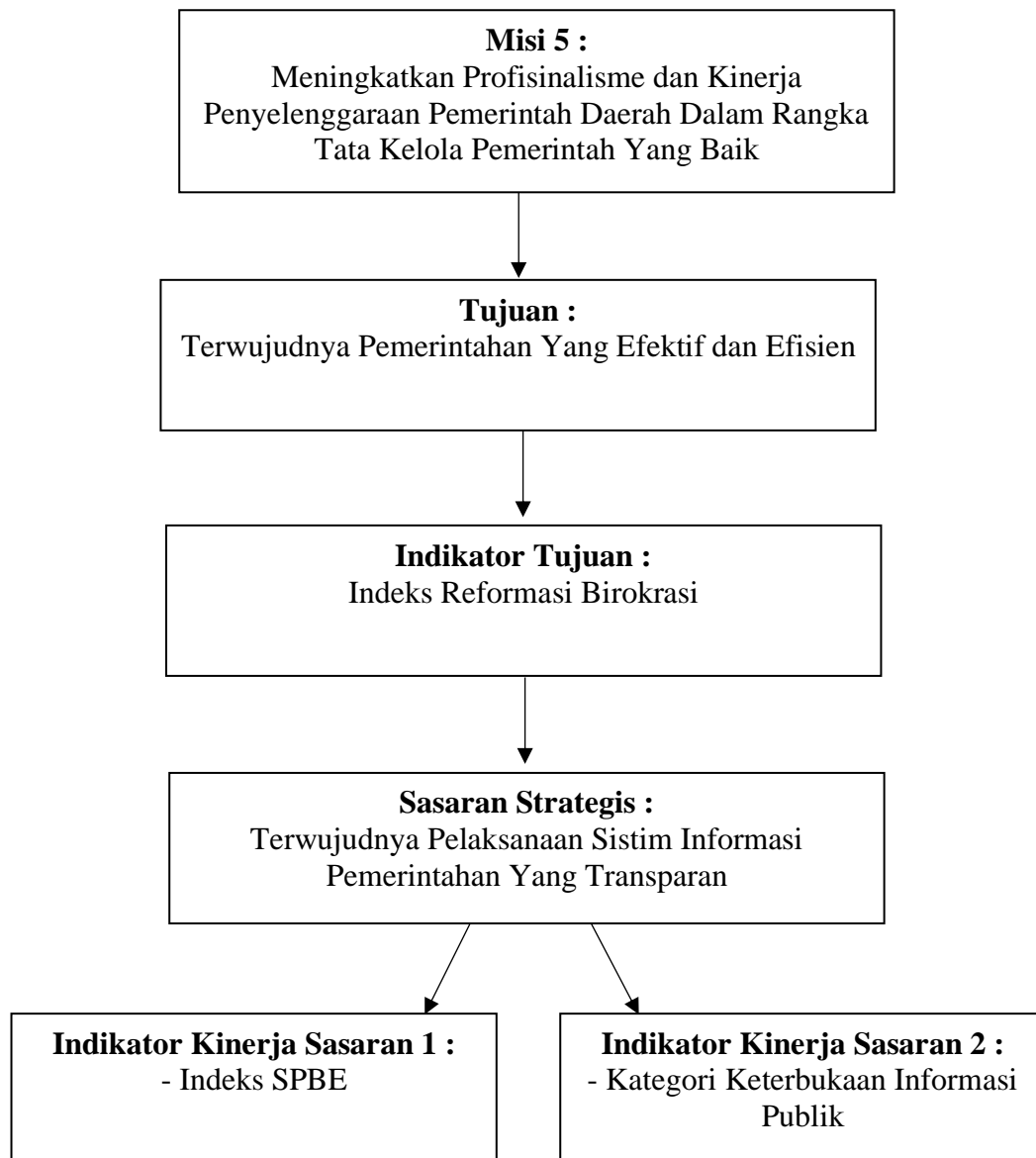
Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	Hasil Penilaian Mandiri Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
				- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng

2.7. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektif dan efisien Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam Matrik Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.



2.8. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 menetapkan 1 (Satu) sasaran dan 2 (Dua) indikator yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun Sasaran Utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada tahun 2024 dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	2,6<3,5
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	80-89 (Baik)

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.036.038.344
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	713.745.000
3. Program Aplikasi Informatika	3.173.556.100
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.145.000
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	48.726.000

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran indikator sasaran tersebut sebesar **Rp 9.147.210.444** (*Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel. 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 5 berikut:

Tabel. 5
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Indeks SPBE	2,6<3,5	2,56	73,14	Hasil Penilaian Mandiri Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
		Kategori Keterbukaan Informasi Publik	80-89(Baik)	64	80	Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng
Rata – Rata Capaian Kinerja					76,57	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 6 yaitu Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2024 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Indeks SPBE	2,6<3,5	2,56	73,14
		Kategori Keterbukaan Informasi Publik	80-89 (Baik)	64	80

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan

Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan terdiri dari 1 Sasaran dan 2 Indikator yaitu:

a. Indeks SPBE

Merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Pelaksanaan Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Tahun 2024 nilai indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara 2,56 dengan **Predikat Cukup** Target 2,6<3,5 dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 73,14.

b. Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui serta mendapatkan salinannya karena sekarang kita berada dalam era digital berbasis teknologi informasi.

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa dari Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 51/KEP/KI-SLTG/XII/2024 Tentang Penetapan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 memutuskan bahwa Kabupaten Morowali Utara mendapatkan Nilai 64, Klasifikasi **Cukup Informatif** dan mendapatkan **Peringkat Ketiga**. Tahun 2024 Nilai Kategori Keterbukaan Informasi Publik 64 dengan Target 80-89 dengan rata-rata capaian kinerja 80.

Dari sasaran diatas dengan 2 indikator sasaran tersebut rata – rata capaian kinerja sebesar 76, 57 dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Yaitu **Tinggi**.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Gambaran perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 s.d tahun 2024 dapat dibandingkan secara rinci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	1,76	2,08	2,56
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	45,16)*	64

Gambaran realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2022 sampai dengan 2024 terdapat 1 sasaran dan 2 indikator kinerja . Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan pada Dinas Komumikasi dan Informatika.**

Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Yang Transparan terdapat 2 indikator yaitu :

a. **Indeks SPBE**

Dari tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara Nilai Indeks SPBE 2,56 dengan **Predikat Cukup**. Jika dilihat dari Tabel 7 diatas nampak bahwa Nilai Indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara berturut – turut mengalami Peningkatan di tahun 2023 dan 2024 sedangkan di Tahun 2022 Kabupaten Morowali Utara Nilai Indeks SPBE 1,76 dengan Predikat kurang dengan rata – rata capaian realisasi kinerja 50,28 dari target 3,5.

b. **Kategori Keterbukaan Informasi Publik**

Dari tabel tersebut diatas bahwa dari Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 51/KEP/KI-SLTG/XII/2024 Tentang Penetapan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bahwa Kabupaten Morowali Utara mendapatkan Nilai 64 dengan

Klasifikasi **Cukup Informatif** dan mendapatkan **Peringkat Ketiga**. Jika di lihat dari tabel 7 diatas nampak bahwa di tahun 2024 mengalami Peningkatan dibandingkan di tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, Kabupaten Morowali Utara tetap mengisi dan mengumpulkan kuesioner pada bulan November Tahun 2023 melalui Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Skor 239. Pada tahun 2022 Provinsi mengadakan hasil Monev Layanan Informasi Keterbukaan Publik pada Kabupaten Morowali Utara dengan Nilai Indeks 45,16 dari target 60-79 dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 57,16.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	2,6<3,5	2,56	73,14
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	90-100 (Baik Sekali)	64	80

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 terhadap RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya $\geq 73,14$
2. Satu Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 80

Dapat dilihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan target akhir Renstra 2021-2026 pada tahun 2024 belum mencapai target. Namun di tahun 2024 kedua indikator tersebut tersebut rata – rata capaian kinerja sebesar 76, 57 dengan skala nilai Peringkat Kinerja **Tinggi**.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan

Capaian rata-rata kinerja sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2024 yakni **Rata – Rata Sebesar 76,57** dengan skala Nilai Peringkat Kinerja **Tinggi**.

Pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Dalam sasaran ini terdapat indikator kinerja :

a. Indeks SPBE mengalami Peningkatan di Tahun 2024

Ada 4 Standar Penilaian SPBE diantaranya :

- 1) Kebijakan SPBE
- 2) Tata Kelola SPBE
- 3) Manajemen SPBE
- 4) Layanan SPBE

Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara , masih menggambarkan predikat Cukup dalam penerapan SPBE, namun terdapat beberapa Keunggulan dan Kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa layanan yang telah diterapkan dengan baik, antara lain Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Layanan-layanan tersebut menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Morowali Utara . Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek manajemen SPBE dimana Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum memiliki Penerapan Manajemen dan Audit TIK. Hal ini tercermin dari belum adanya penerapan Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Kompetensi SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Layanan, Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Pelaksanaan Audit Keamanan.

Pada beberapa aspek berikut perlu menjadi perhatian untuk dapat ditingkatkan dan menjadi Fokus dalam pengembangan Penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Manajemen SPBE. Kemudian Aspek Audit TIK dalam hal audit infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan SPBE. Perlu adanya Kerjasama dan Kolaborasi Bersama BRIN dan BSSN dalam memperkuat proses Audit TIK yang saat ini belum

berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dengan Audit TIK yang terlaksana memberikan gambaran kondisi dan status penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

b. Kategori Keterbukaan Informasi Publik mengalami Peningkatan di Tahun 2024

Dari hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 51/KEP/KI-SLTG/XII/2024 Tentang Penetapan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bahwa Kabupaten Morowali Utara mendapatkan Nilai 64 dengan Klasifikasi Cukup Informatif dan mendapatkan Peringkat Ketiga.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Jl. H.A. Satrio No. 88 (Dipusatkan) Sektor: Dua PERUMBUAN DAN PETERBUKARAN (P2) PAU
No. 20470 400 100, Fax: 20470 407 000, E-mail: komisi@provinsisulawesi-tengah.go.id

LAMPYANG
REPUBLIK INDONESIA
SULAWESI TENGAH
KORANGLA CLOEYNO AITKUYOUSA
SUNDAU
PONTIANAK HALLA MOKATEBING DAN
EVALUASI KEBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	REKOR JEJAK LAYANAN		
		NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
1	KABUPATEN MOROWALI	64	CUKUP INFORMATIF	KE-3
2	KABUPATEN SIAWA	75	TIDAK INFORMATIF	
3	KABUPATEN MAMBALEA	78	TIDAK INFORMATIF	
4	KABUPATEN TOLOLOLO	84	INFORMATIF	KE-2
5	KABUPATEN BANGGAI	88	TIDAK INFORMATIF	
6	KABUPATEN MOROWALI	78	TIDAK INFORMATIF	
7	KABUPATEN BANGGAI	84	CUKUP INFORMATIF	KE-3
8	KABUPATEN BANGGAI	81	INFORMATIF	KE-2
9	KABUPATEN BANGGAI	88	CUKUP INFORMATIF	KE-3
10	KABUPATEN BANGGAI	88	CUKUP INFORMATIF	KE-3
11	KABUPATEN BANGGAI	88	CUKUP INFORMATIF	KE-3
12	KABUPATEN BANGGAI	88	CUKUP INFORMATIF	KE-3
13	KABUPATEN BANGGAI	88	CUKUP INFORMATIF	KE-3

PAU, 2 Desember 2024
KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUK
S. SANGIEN A. NARIBU, S.H., M.H.

Dari pencapaian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah telah mengisi/mengumpulkan Quesioner Layanan Informasi Komunikasi Publik.

Ada 3 Kategori Layanan yang telah dilakukan :

1. Pengelolaan Layanan Informasi Publik
2. Pengelolaan Komunikasi Publik
3. Pengelolaan Aduan Masyarakat

MONEV INTERNAL
LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAN KOMUNITAS PUBLIK
DI RANGKAIAN PERSEKUTUAN MELAYU TERBUKA
(sebagai DOU yang berstatus RUM)

A. IDENTITI

NAMA (Sila tulis nama RUM/PERK/PPK/PPK) _____
 POKOK BAHAGIAN (Sila tulis) _____
 PRO UTAMA (Sila tulis) _____
 NAMA _____
 NO. PUKA _____

B. PENGELOJAJ KOPERASI PUBLIK

1. PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK MELALUI WEB RESMI PEMDA (berformat pdf)

CARA AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- WEB atau media berlainan (go id)
- Aplikasi yang berstatus android/iOS/Windows dan dapat diakses secara umum
- Media sosial resmi (twitter, linkedin) dengan nama badan Publik
- Media sosial resmi (Facebook) identik dengan nama badan Publik
- Media sosial resmi (Instagram) identik dengan nama badan Publik
- Media sosial melalui EMAIL khusus untuk layanan INFOMATIKA PUBLIK/ DAFTAR PENGALAMAN PUBLIK

DOKUMEN TENTANG KEPESAWANAN

- Daftar gaji dan gaji pokok
- MyKad Pekerja (Sila tulis) (nama mal termasuk foto, data peribadi, alamat, tarikh lahir, masa perkhidmatan, dan masa jabatan)
- Daftar AGI (termasuk termasuk data statistik, berdasarkan undang-undang, golongan yang telah lahir)
- Laporan Hasil Pelaksanaan (LHKL) PPM (termasuk pejabat negara (Bupati/Walikota), Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan Ketua DPRD)

DOKUMEN TENTANG KEUANGAN DAN ASSET

- Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2023
- Laporan Kas Laporan Keuangan (LAKL)
- Anggaran tahunan
- Daftar aset
- Fasilitas Utama Anggaran (FUA) Pihak/Pegawai Anggaran Sementara (PPAS)
- Rencana Utama Pengadaan (RUP) dan LPSE

DOKUMEN TENTANG PERENCANAAN

- Indikator Fungsi Utama (IFU)
- Rencana (Rencana Strategis)
- Rencana (Rencana Operasional)
- LAPORAN (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Daerah)
- Perencanaan Sistem (Rencana Kerja MPT)

DOKUMEN TENTANG KETAHUAN

- Agenda Pimpinan (Buku Kalendar Buku Tahun) (Januari s.d. September)
- Buku SURAT MANDUK (Buku Manduk) (Januari s.d. September)
- Buku SURAT HILJAH (Buku Hiljah) (Januari s.d. September)

DOKUMEN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- Daftar akses Publik (DAP)
- Daftar akses yang sudah ditetapkan oleh WI yang dilaksanakan oleh PPD Utama DPT
- SK Pimpinan Daerah tentang Struktur PPD Utama
- SK Pimpinan Daerah tentang Struktur Dewan perimbangan PPD
- Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PDBJ) yang dilaksanakan oleh LPSE

DOKUMEN TENTANG KEMERIAH BAHAN PUBLIK

- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

DOKUMEN TENTANG PROSEDUR INFORMASI PUBLIK

- Skema skema
- JemaDukuhMajelis

DOKUMEN TENTANG SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- SOP pelayanan dan penerimaan data/informasi publik
- SOP pemrosesan dan informasi yang disediakan melalui konsultasi
- SOP pelayanan informasi dan akses ke publik
- SOP penanganan keluhan dan aduan informasi publik
- SOP fasilitas pengalihan informasi publik
- SOP pengujian ketersediaan informasi publik
- SOP pemeliharaan dan pengiraan perkhidmatan informasi publik
- SOP mekanisme pemeliharaan perkhidmatan atau pengiraan oleh badan Publik
- SOP mekanisme pengurusan informasi publik

DOKUMEN TENTANG DELAHKAWARD DAN JASA

- Informasi tentang Rencana utama pengadaan (RUP) dan LPSE

TAJUK PELAYANAN DOKUMEN TENTANG DELAHKAWARD DAN JASA

- Katalog sukanisasi (KAS)
- Rangka pelaksanaan sukanisasi (RPL)
- Skema sukanisasi
- Rancangan kontrak
- Dokumen perincian proses perkhidmatan atau tender dan perkhidmatan
- Daftar kualifikasi harga
- Akaun perkhidmatan dan data kecek perkhidmatan
- Gambar rancangan perkhidmatan
- Dokumen sukanisasi dan dokumen pelaksanaan sukanisasi sukanisasi sukanisasi

2. PUBLIKASI BERKAITAN PIMPINAN MELALUI WEB RESMI PEMDA (berformat pdf)

DOKUMEN TENTANG KEGIATAN BERKAITAN PPD UTAMA PROVINSI

- Mengikuti RUM/PPK tentang PPK/SP Tahun 2023 & PPK
- Mengikuti BAKTICAKUP-S-DRS/DRS/DRS tentang PPK/SP yang dilaksanakan oleh PPD Utama Provinsi (PPK/PPK)
- Mendampingi ke website publikasi dengan (PTTK) Kementerian Komunikasi & Informatika

INFORMASI TENTANG KEGIATAN PIMPINAN OPERASIONAL

Jumlah publikasi kegiatan Pimpinan Daerah/Pimpinan DPRD melalui web: <http://www.infopublikal.id>

- Jumlah berita = 1800 N/A = 30
- Jumlah berita = 500 s.d. 1000 N/A = 20
- Jumlah berita = 300 s.d. 500 N/A = 10

hasil raman = berita (diinput oleh Tim Monev)

10

Jumlah publikasi melalui sukanisasi dengan Kementerian Komunikasi & Informatika (KEMKOMINFO)

- Jumlah sukanisasi = 12 N/A = 30
- Jumlah sukanisasi = 5 s.d. 12 N/A = 20
- Jumlah sukanisasi = 5 s.d. 12 N/A = 10

hasil raman = berita (diinput oleh Tim Monev)

0

Jumlah publikasi media atau program dengan Kementerian Komunikasi & Informatika (KEMKOMINFO)

- Jumlah sin program = 300 N/A = 30

hasil raman = berita (diinput oleh Tim Monev)

0

Jumlah publikasi kegiatan Pimpinan Daerah/Pimpinan DPRD melalui web serta PPK yang sedang berlangsung (PPK)

- Jumlah berita = 1800 N/A = 25
- Jumlah berita = 500 s.d. 1000 N/A = 15
- Jumlah berita = 300 s.d. 500 N/A = 5

hasil raman = berita (diinput oleh Tim Monev)

Disipul PPK/DA berita

25

C. PENGELOLAAN LAYANAN ADUAN MASYARAKAT		URUT
1. DUKUNGAN PENYELESAIAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI Laporan (lapormasaka.lapormasaka.go.id)		30
Pergeseran aduan masyarakat melalui aplikasi berbasis WEB		0
1. Menambah aplikasi WEB untuk dapat mengelola aplikasi aduan masyarakat		0
2. Mengelola aplikasi aduan masyarakat melalui aplikasi Laporan (storage:SDH/INSTANSI)		0
2. PENYELESAIAN ADUAN MELALUI APLIKASI LAPOR		70
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BERKAS 1. KAS 2. DOKUMEN 3. NO. BERKAS 4. KURSI </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> dan akan Tim Himpun hasil analisis → 1 </div> </div>		0

KABUPATEN MOROWALI UTARA	96	126	100
	INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	RESPONSIF

NO	KATEGORI LAYANAN	NILAI	PREDIKAT
1	PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	96	INFORMATIF
2	PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	126	KURANG KOMUNIKATIF
3	PENGELOLAAN ADUAN MASYARAKAT	100	RESPONSIF

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	RANGE
INFORMATIF	90-100
MENUJU INFORMATIF	80-89,9
CUKUP INFORMATIF	60-79,9
KURANG INFORMATIF	40-59,9
TIDAK INFORMATIF	0-39,9

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	RANGE
KOMUNIKATIF	180-200
CUKUP KOMUNIKATIF	150-179,9
KURANG KOMUNIKATIF	100-149,9
TIDAK KOMUNIKATIF	0-99,9

PENGELOLAAN ADUAN MASYARAKAT	RANGE
RESPONSIF	80-100
CUKUP RESPONSIF	70-79,9
KURANG RESPONSIF	50-69,9
TIDAK RESPONSIF	0-49,9

Adapun hasil pengisian Questioner diatas tiga Kategori Layanan dengan hasil penilaian terdapat satu Layanan yang masih Kurang Komunikatif yaitu Pengelolaan Komunikasi Publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan komunikasi publik dapat dilakukan dengan berbagai strategi seperti :

1. Menyusun kebijakan teknis dan strategi komunikasi publik
2. Memantau aspirasi dan opini publik, serta mengumpulkan data dan informasi kebijakan pemerintah
3. Menyusun agenda komunikasi pemerintah daerah
4. Menyusun dan memproduksi konten informasi publik
5. Menyediakan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik
6. Mengelola media komunikasi milik pemerintah dan menggunakan media social secara bijak
7. Menjalin hubungan dengan media mainstream, komunitas dan kemitraan
8. Mengelola krisis komunikasi publik
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Buat SOP yang sesuai dengan prosedur kerja dilapangan

11. Menggunakan pola-pola baru dengan inovasi dan kreativitas

Komunikasi publik yang baik dapat membantu menciptakan ruang publik yang optimis dan jernih. Informasi tentang proses perumusan kebijakan yang mengalir secara transparan kepada Masyarakat dapat membantu masyarakat memahami latar belakang, tujuan dan langkah-langkahnya.

Selain itu perlu di tingkatkan kembali Kerbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Informasi publik harus mudah diakses, cepat, tepat waktu dan biaya ringan
2. Informasi publik harus disebarluaskan dalam bahasa yang muda dipahami
3. Masyarakat harus diinformasikan tentang hak atas informasi dan cara mengaksesnya
4. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat
5. Informasi terkait perencanaan dan realisasi anggaran harus dipublikasikan secara terbuka
6. Masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik terkait layanan yang diberikan
7. Lembaga publik dapat bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan transparan dan akuntabilitas
8. Badan publik harus melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian berdasarkan peraturan perundang – undangan

Karena kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

1. Keuangan

Pada tahun 2024, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 8.941.473.444,-
2	Belanja Modal	Rp 205.737.000,-
3	Alokasi Total Belanja	Rp 9.147.210.444,-

Dari total anggaran sebesar RP 9.147.210.444,- tersebut sampai akhir tahun 2024 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 8.260.601.403,-
2	Belanja Modal	Rp 141.370.000,-
3	Alokasi Total Belanja	Rp 8.401.971.403,-

Persentase serapan anggaran di tahun 2024 :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 8.260.601.403,-
2	Belanja Modal	Rp 141.370.000,-
3	Alokasi Total Belanja	Rp 8.401.971.403 ,-

- a) Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$
= $\frac{\text{Rp 8.260.601.403,-} \times 100\%}{\text{Rp 8.941.473.444,-}}$
= 92,38 %
- b) Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$
= $\frac{\text{Rp 141.370.000,-} \times 100\%}{\text{Rp 205.737.000,-}}$
= 68,71 %
- c) Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja} \times 100\%}{\text{Alokasi Total Belanja}}$
= $\frac{\text{Rp 8.401.971.403,-} \times 100\%}{\text{Rp 9.147.210.444,-}}$
= 91,85 %

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 49 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III/a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 4 orang , Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang serta Pegawai Non Eselom sebanyak 18 orang. Selain Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 18 orang.

Dari jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang ada selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja guna mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah.

3.1.6 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Program dan Kegiatan sangat berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika periode Tahun 2024 memaparkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

1. Laporan Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2024 berdasarkan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 9.147.210.444,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

- Belanja Operasi : Rp 8.941.473.444,-
- Belanja Modal : Rp 205.737.000,-

2. Penjelasan Laporan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman kepada Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp 9.147.210.444,-** dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2024 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk Belanja Operasi telah dianggarkan sebesar Rp 8.941.473.444,- dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp 205.737.000,-

3.3 Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp 9.147.210.444,- dengan Realisasi Anggaran Rp 8.401.971.403,- atau 91,85 %

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%) Capaian Anggaran
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.036.038.344	4.607.792.041	91,50 %
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik				
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	713.745.000	641.935.531	89,94 %
			Program Aplikasi Informatika	3.173.556.100	2.978.408.923	93,85 %
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.145.000	128.451.992	73,34 %
			Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi	48.726.000	45.382.916	93,14 %

BAB IV P E N U T U P

Hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 terhadap dua indikator kinerja utama yaitu Indeks SPBE menunjukkan realisasi sebesar 73,14 dan Kategori Keterbukaan Informasi Publik realisasi sebesar 80 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 76,57 atau dengan skala nilai peringkat kinerja **Tinggi**.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa mendatang agar peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara benar dengan menunjukkan indikator kinerja utama adalah

1. Konsistensi dalam menjalankan Tujuan / Sasaran yang akan di capai sesuai dengan target yang telah di tentukan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara ;
2. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi Indeks SPBE dan Kategori Informasi Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten untuk pencapaian kinerja; dan
3. Meningkatkan kinerja diantaranya adalah dari mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utaraa pada Tahun Anggaran 2024 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Kolonodale, 20 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA


GATOT SE BUDI MANTO, S.Kom
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19761228 200604 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KAB. MOROWALI UTARA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GATOT S.E BUDIYANTO, S.Kom**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
Kab. Morowali Utara

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**
Jabatan : Bupati Morowali Utara


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama akan berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 9 Desember 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah Kab. Morowali Utara,




GATOT S.E BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	2,6<3,5
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	80-85 (Baik)


No	Program	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5,036,038,344	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 713,745,000	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 3,173,556,100	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 175,145,000	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 48,726,000	
	JUMLAH	Rp 9,147,210,444	

PIHAK KEDUA
 BUPATI MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PIHAK PERTAMA
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Daerah Kab. Morowali Utara,



GATOT S.E BUDIYANTO, S.Kom
 NIP. 19761228 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Kompleks Perkantoran Jl. Bumi Nangka, No. Kolonodale. Kode Pos 94671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR : 555/129.a/SK/DISKOMINFO/X/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan
Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Daerah tentang Indikator
Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- KEDUA : Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



DRS. IVAN RIZAL MAREOLI

Pembina Tkt.I,IV/b

NIP. 19691023 200212 1 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KAB. MOROWALI UTARA

NOMOR : 555/129.a /SK/DISKOMINFO/X/2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan/Formulasi IKU	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Indeks SPBE	Hasil Penilaian Mandiri Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	Kementrian PANRB
		Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik	Bidang IKP Diskominfo Sulteng

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



DRS. IVAN RIZAL MAREOLI
Pembina Tkt.I,IV/b
NIP. 19691023 200212 1 005



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706); dan
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 299 Tahun 2024 tentang Lokus Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan, dapat menggunakan hasil evaluasi mengikuti nomenklatur instansi sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai capaian kinerja tahun 2024 dan acuan untuk perencanaan kinerja tahun 2025.
- KEEMPAT : Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Badan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,08	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4,00	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,46	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3,92	Sangat Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,98	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,64	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,63	Sangat Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,33	Memuaskan
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4,46	Memuaskan
11	Kementerian Dalam Negeri	4,21	Memuaskan
12	Kementerian Luar Negeri	3,93	Sangat Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,88	Sangat Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,36	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,74	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	4,00	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,73	Sangat Baik
21	Kementerian Agama	4,63	Memuaskan
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Baik
23	Kementerian Sosial	3,58	Sangat Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,99	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,75	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,22	Memuaskan
28	Kementerian Perindustrian	3,44	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,35	Memuaskan
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,68	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,95	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,15	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,54	Sangat Baik
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4,10	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	4,06	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Negara	4,19	Sangat Baik
3	Badan Pusat Statistik	4,53	Memuaskan
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,88	Sangat Baik
5	Badan Informasi Geospasial	3,88	Sangat Baik
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,51	Sangat Baik
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,31	Memuaskan
8	Perpustakaan Nasional RI	4,12	Sangat Baik
9	Badan Standardisasi Nasional	3,81	Sangat Baik
10	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,91	Sangat Baik
11	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,53	Memuaskan
12	Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,16	Baik
13	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,98	Sangat Baik
14	Badan Narkotika Nasional	3,38	Baik
15	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3,14	Baik
16	Badan Keamanan Laut	3,57	Sangat Baik
17	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	3,63	Sangat Baik
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,95	Sangat Baik
19	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	3,09	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
20	Badan Pangan Nasional	3,91	Sangat Baik
21	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,38	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Intelijen Negara	4,20	Memuaskan
2	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3,47	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	2,90	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	4,13	Sangat Baik
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3,00	Baik
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4,23	Memuaskan
4	Sekretariat Mahkamah Agung RI	3,52	Sangat Baik
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3,81	Sangat Baik
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	3,91	Sangat Baik
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2,65	Baik
8	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	2,99	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Instansi Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset Inovasi Nasional	4,19	Sangat Baik
2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,07	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	3,21	Baik
2	Radio Republik Indonesia	3,37	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	3,37	Baik
2	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	3,53	Sangat Baik
3	Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3,32	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,36	Memuaskan
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,66	Memuaskan
6	Sekretariat Jenderal Ombudsman	3,93	Sangat Baik
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3,75	Sangat Baik
8	Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2,82	Baik
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,47	Baik
10	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	2,65	Baik
11	Sekretariat Komisi Kejaksaan	1,67	Kurang
12	Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	2,22	Cukup
13	Dewan Pertimbangan Presiden	2,63	Baik
14	Sekretariat Dewan Pers	2,58	Cukup
15	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	3,39	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	3,57	Sangat Baik
17	Badan Pengusahaan Sabang	2,42	Cukup
18	Badan Pengusahaan Batam	3,82	Sangat Baik
19	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	3,54	Sangat Baik
20	Lembaga Sensor Film	2,75	Baik
21	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	2,36	Cukup
22	Kantor Staf Presiden	3,93	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,64	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	2,39	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,25	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,44	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	2,48	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	2,29	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bireuen	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	2,28	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,86	Baik
13	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,69	Baik
14	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,86	Baik
15	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,94	Baik
16	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,67	Baik
17	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,66	Baik
18	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,61	Baik
19	Pemerintah Kota Sabang	3,02	Baik
20	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,70	Sangat Baik
21	Pemerintah Kota Langsa	1,95	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
22	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,80	Baik
23	Pemerintah Kota Subulussalam	2,48	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,57	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,66	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,37	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	3,14	Baik
10	Pemerintah Kab. Asahan	2,86	Baik
11	Pemerintah Kab. Nias	3,72	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Toba	2,95	Baik
13	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,89	Baik
14	Pemerintah Kab. Nias Selatan	2,90	Baik
15	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,80	Baik
16	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,66	Baik
17	Pemerintah Kab. Samosir	2,70	Baik
18	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,65	Baik
19	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,17	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	2,26	Cukup
21	Pemerintah Kab. Batubara	2,67	Baik
22	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,93	Cukup
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,78	Baik
24	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Cukup
25	Pemerintah Kab. Nias Utara	2,41	Cukup
26	Pemerintah Kota Medan	3,67	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,79	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
28	Pemerintah Kota Binjai	3,12	Baik
29	Pemerintah Kota Pematang Siantar	3,06	Baik
30	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3,24	Baik
31	Pemerintah Kota Sibolga	2,41	Cukup
32	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2,66	Baik
33	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,33	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,79	Baik
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,54	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,50	Cukup
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	3,46	Baik
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	3,51	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Siak	3,54	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3,23	Baik
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3,08	Baik
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,85	Sangat Baik
13	Pemerintah Kota Dumai	3,90	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	3,25	Baik
3	Pemerintah Kab. Karimun	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Natuna	3,61	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Lingga	2,60	Baik
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	3,04	Baik
7	Pemerintah Kota Batam	3,77	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Tanjungpinang	3,25	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,85	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,56	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,67	Baik
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	3,51	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,23	Memuaskan
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	2,81	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	3,00	Baik
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2,46	Cukup
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3,28	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3,61	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	3,66	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	3,16	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,41	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,75	Sangat Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,96	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,75	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	3,44	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,55	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	2,92	Baik
4	Pemerintah Kab. Bungo	2,71	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Merangin	3,20	Baik
6	Pemerintah Kab. Kerinci	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	3,10	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,62	Baik
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,62	Baik
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,83	Baik
11	Pemerintah Kota Jambi	4,32	Memuaskan
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3,00	Baik
2	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	3,62	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,62	Baik
4	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Lahat	2,33	Cukup
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	3,09	Baik
7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,71	Baik
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,61	Baik
10	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	2,40	Cukup
11	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,94	Baik
12	Pemerintah Kab. Empat Lawang	2,34	Cukup
13	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,38	Cukup
14	Pemerintah Kota Palembang	3,51	Sangat Baik
15	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,54	Cukup
16	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,64	Baik
17	Pemerintah Kota Prabumulih	3,37	Baik
18	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,11	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,80	Baik
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,35	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	3,16	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	4,07	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,25	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	4,16	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	3,81	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,92	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	3,28	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,87	Baik
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,24	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,42	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,26	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,47	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	3,38	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,84	Baik
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,63	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	4,09	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	3,08	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	3,12	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,85	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Tanggamus	3,44	Baik
8	Pemerintah Kab. Way Kanan	3,52	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pesawaran	3,49	Baik
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,49	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	3,05	Baik
13	Pemerintah Kab. Mesuji	3,99	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2,94	Baik
15	Pemerintah Kota Metro	3,34	Baik
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,98	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	4,46	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,73	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bogor	4,10	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,95	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,75	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,40	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	3,94	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	3,38	Baik
9	Pemerintah Kab. Bandung	3,98	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	4,51	Memuaskan
11	Pemerintah Kab. Garut	3,89	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3,76	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3,65	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3,61	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	3,57	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,93	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,94	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,78	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,56	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	4,59	Memuaskan
21	Pemerintah Kota Bogor	4,08	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	4,13	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,83	Sangat Baik
25	Pemerintah Kota Depok	4,32	Memuaskan
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,15	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,96	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,58	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,47	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,73	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,45	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,52	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	3,85	Sangat Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,56	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,61	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,48	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemasang	3,04	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sngat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,90	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	4,20	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Semarang	3,95	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,64	Sangat Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,76	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,95	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,69	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	4,30	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,43	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Gresik	4,32	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	4,16	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Jombang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	3,67	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	3,92	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Sumenep	3,73	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,92	Baik
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	3,86	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Situbondo	4,21	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,77	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Jember	3,54	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Malang	3,74	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Pasuruan	3,88	Sangat Baik
16	Pemerintah Kab. Probolinggo	3,97	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Lumajang	3,39	Baik
18	Pemerintah Kab. Kediri	4,63	Memuaskan
19	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,78	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Nganjuk	3,84	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,22	Memuaskan
22	Pemerintah Kab. Blitar	3,77	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Ngawi	3,61	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
24	Pemerintah Kab. Magetan	2,92	Baik
25	Pemerintah Kab. Ponorogo	3,07	Baik
26	Pemerintah Kab. Pacitan	3,50	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Bojonegoro	4,14	Sangat Baik
28	Pemerintah Kab. Tuban	4,24	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Lamongan	4,18	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Madiun	4,31	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Surabaya	4,54	Memuaskan
32	Pemerintah Kota Mojokerto	4,32	Memuaskan
33	Pemerintah Kota Malang	4,24	Memuaskan
34	Pemerintah Kota Pasuruan	4,07	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Probolinggo	4,04	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Blitar	4,11	Sangat Baik
37	Pemerintah Kota Kediri	3,89	Sangat Baik
38	Pemerintah Kota Madiun	4,57	Memuaskan
39	Pemerintah Kota Batu	3,57	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,91	Baik
3	Pemerintah Kab. Sanggau	3,29	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	2,30	Cukup
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,73	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,82	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	3,06	Baik
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	3,12	Baik
9	Pemerintah Kab. Landak	2,40	Cukup
10	Pemerintah Kab. Melawi	2,47	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sekadau	3,13	Baik
12	Pemerintah Kab. Kubu Raya	3,38	Baik
13	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,68	Baik
14	Pemerintah Kota Pontianak	3,49	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
15	Pemerintah Kota Singkawang	3,35	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Kapuas	2,63	Baik
3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan	3,20	Baik
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3,22	Baik
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,87	Baik
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	3,16	Baik
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2,74	Baik
9	Pemerintah Kab. Lamandau	3,15	Baik
10	Pemerintah Kab. Sukamara	2,75	Baik
11	Pemerintah Kab. Murung Raya	2,63	Baik
12	Pemerintah Kab. Katingan	3,25	Baik
13	Pemerintah Kab. Seruyan	2,50	Cukup
14	Pemerintah Kab. Barito Timur	2,82	Baik
15	Pemerintah Kota Palangka Raya	3,75	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3,63	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,81	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	4,09	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	3,37	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,70	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,43	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,51	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,30	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	3,34	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,06	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,74	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	3,09	Baik
3	Pemerintah Kab. Paser	3,27	Baik
4	Pemerintah Kab. Berau	2,28	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,02	Baik
7	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,87	Baik
8	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	2,25	Cukup
9	Pemerintah Kota Samarinda	3,85	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Balikpapan	3,96	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bontang	3,39	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bulungan	3,93	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Malinau	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Nunukan	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,84	Baik
6	Pemerintah Kota Tarakan	3,11	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Minahasa	2,23	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	2,46	Cukup
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,39	Cukup
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	3,37	Baik
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,34	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2,46	Cukup
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	3,02	Baik
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,66	Baik
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,88	Baik
13	Pemerintah Kota Manado	3,93	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bitung	3,31	Baik
15	Pemerintah Kota Tomohon	3,03	Baik
16	Pemerintah Kota KotaMobagu	2,93	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	4,13	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,68	Baik
3	Pemerintah Kab. Boalemo	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,52	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bone Bolango	3,00	Baik
6	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	2,89	Baik
7	Pemerintah Kota Gorontalo	2,82	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2,91	Baik
2	Pemerintah Kab. Poso	2,52	Cukup
3	Pemerintah Kab. Donggala	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Tolitoli	2,49	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Banggai	3,59	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Buol	3,19	Baik
7	Pemerintah Kab. Morowali	3,25	Baik
8	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,55	Cukup
9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	2,72	Baik
10	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	3,06	Baik
11	Pemerintah Kab. Sigi	2,29	Cukup
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut	2,11	Cukup
13	Pemerintah Kab. Morowali Utara	2,56	Cukup
14	Pemerintah Kota Palu	2,58	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,94	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pinrang	3,49	Baik
3	Pemerintah Kab. Gowa	3,63	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Wajo	2,77	Baik
5	Pemerintah Kab. Bone	3,18	Baik
6	Pemerintah Kab. Tana Toraja	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Maros	3,15	Baik
8	Pemerintah Kab. Luwu	2,60	Baik
9	Pemerintah Kab. Sinjai	3,01	Baik
10	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,56	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bantaeng	3,64	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Jeneponto	3,10	Baik
13	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	2,57	Cukup
14	Pemerintah Kab. Takalar	2,80	Baik
15	Pemerintah Kab. Barru	2,79	Baik
16	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	3,04	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Soppeng	2,98	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
19	Pemerintah Kab. Enrekang	3,20	Baik
20	Pemerintah Kab. Luwu Utara	3,26	Baik
21	Pemerintah Kab. Luwu Timur	3,16	Baik
22	Pemerintah Kab. Toraja Utara	2,31	Cukup
23	Pemerintah Kota Makassar	4,02	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Parepare	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Palopo	3,12	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Konawe	2,92	Baik
3	Pemerintah Kab. Buton	2,26	Cukup
4	Pemerintah Kab. Muna	2,35	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kolaka	3,68	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	3,68	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	2,63	Baik
8	Pemerintah Kab. Bombana	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Wakatobi	2,55	Cukup
10	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,19	Cukup
11	Pemerintah Kab. Konawe Utara	2,85	Baik
12	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	2,12	Cukup
13	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Buton Selatan	2,25	Cukup
15	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,63	Baik
16	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,82	Cukup
17	Pemerintah Kota Kendari	3,23	Baik
18	Pemerintah Kota Baubau	3,09	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3,70	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pasangkayu	2,52	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamuju	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mamasa	2,01	Cukup
5	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,88	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Majene	3,04	Baik
7	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,30	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Buleleng	3,69	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Jembrana	3,77	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Gianyar	3,49	Baik
5	Pemerintah Kab. Karangasem	2,57	Cukup
6	Pemerintah Kab. Bangli	2,71	Baik
7	Pemerintah Kab. Badung	3,87	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tabanan	3,54	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Klungkung	3,14	Baik
10	Pemerintah Kota Denpasar	3,96	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,56	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3,05	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	3,27	Baik
5	Pemerintah Kab. Bima	2,52	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,90	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	2,52	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,45	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,71	Baik
10	Pemerintah Kota Mataram	3,55	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,89	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	2,48	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belu	2,47	Cukup
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,43	Cukup
5	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,83	Baik
6	Pemerintah Kab. Alor	2,19	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sikka	2,02	Cukup
8	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,10	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ende	2,58	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ngada	2,17	Cukup
11	Pemerintah Kab. Manggarai	2,90	Baik
12	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,56	Cukup
13	Pemerintah Kab. Sumba Barat	3,12	Baik
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,42	Cukup
15	Pemerintah Kab. Rote Ndao	3,35	Baik
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,47	Baik
17	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	2,03	Cukup
19	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	2,19	Cukup
20	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	1,84	Cukup
21	Pemerintah Kab. Malaka	2,17	Cukup
22	Pemerintah Kota Kupang	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,63	Baik
2	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	2,24	Cukup
3	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,96	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,31	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	2,41	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,90	Cukup
7	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	2,41	Cukup
8	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,81	Cukup
9	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	2,05	Cukup
10	Pemerintah Kota Ambon	2,64	Baik
11	Pemerintah Kota Tual	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1,90	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	2,06	Cukup
5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	2,43	Cukup
6	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,73	Baik
7	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	1,38	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1,97	Cukup
9	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	2,09	Cukup
10	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kota Ternate	1,89	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	2,03	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,82	Baik

3	Pemerintah Kab. Keerom	1,14	Kurang
4	Pemerintah Kab. Sarmi	1,53	Kurang
5	Pemerintah Kab. Supiori	1,48	Kurang
6	Pemerintah Kota Jayapura	2,35	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Manokwari	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,68	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kaimana	2,15	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	1,61	Kurang
2	Pemerintah Kab. Merauke	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Boven Digoel	2,16	Cukup
4	Pemerintah Kab. Asmat	1,03	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,94	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mimika	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Puncak	1,62	Kurang
5	Pemerintah Kab. Dogiyai	1,53	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Pegunungan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Jayawijaya	2,43	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,09	Kurang
4	Pemerintah Kab. Nduga	1,50	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tolikara	1,47	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	2,39	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,49	Cukup
3	Pemerintah Kab. Raja Ampat	1,33	Kurang
4	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



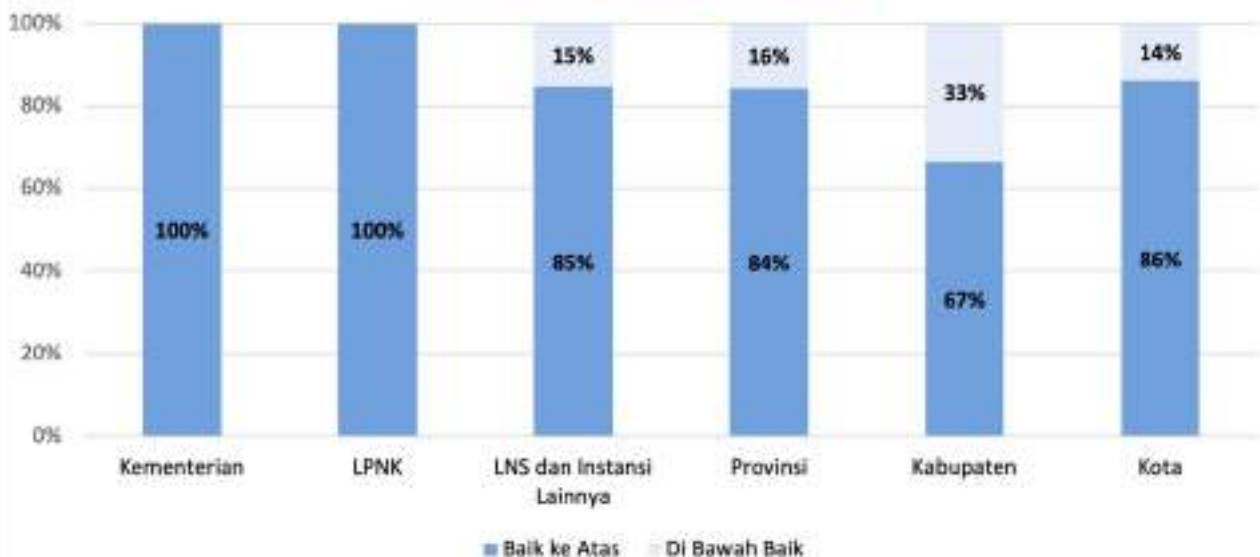
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

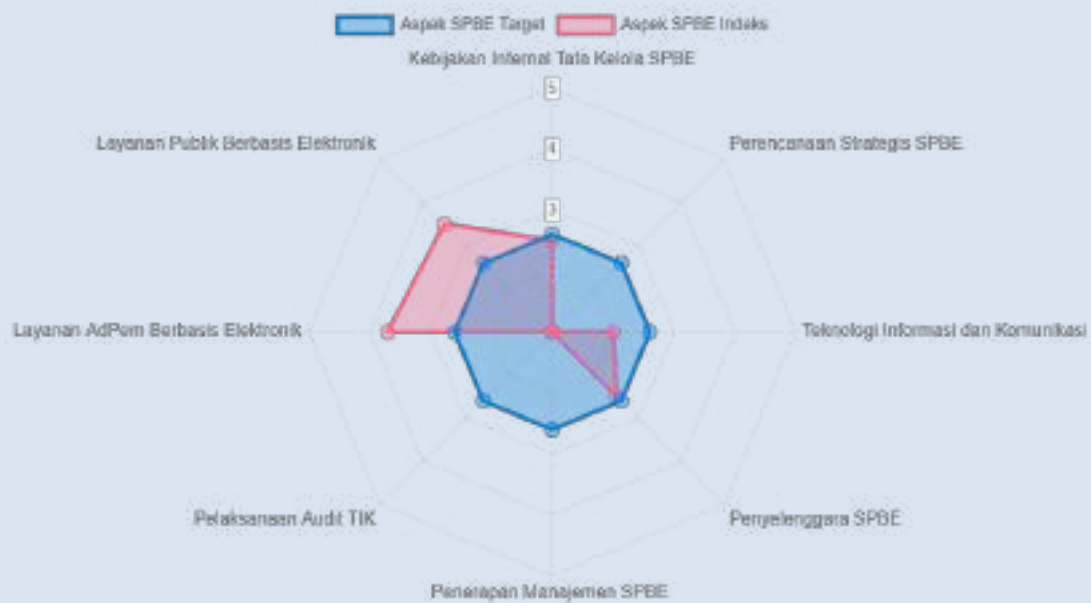
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,56
Domain Kebijakan SPBE	2,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,50
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,62
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tercermin dalam adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE masih belum menunjukkan kekuatan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian seluruh indikator pada aspek tersebut dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketiadaan keselarasan ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah perbaikan agar kebijakan internal tata kelola SPBE dapat diterapkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur secara jelas terkait Pembangunan Aplikasi SPBE. Tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti pendukung yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga belum memiliki kebijakan internal terkait Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan, dan Audit TIK. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan kebijakan yang jelas serta perbaikan dalam prosedur pembangunan aplikasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek perencanaan strategis SPBE di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara belum terpenuhi dengan baik, yang ditunjukkan dengan belum adanya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, serta inovasi dalam proses bisnis. Sehingga hal ini belum mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan SPBE secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, aspek perencanaan strategis SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan SPBE di Kabupaten Morowali Utara dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum memiliki keterpaduan yang jelas antara rencana dan anggaran SPBE serta inovasi dalam proses bisnis SPBE. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah memenuhi standar yang ditetapkan, yang dapat dilihat dari belum adanya dokumen dukung yang tersedia untuk Layanan Jaringan Intra Pemerintah. Dengan adanya dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mendukung infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan SPBE secara efektif.

- Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan dan pengelolaan aspek teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum memiliki proses yang jelas terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika pun ada, bukti tersebut hanya mengatur sebagian dari proses yang dijalankan dalam Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dan pemenuhan prosedur secara menyeluruh

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah terpenuhi dengan baik, terlihat dari sudah adanya dokumen dan bukti dukung terkait pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE serta kolaborasi dalam penerapan SPBE. Dengan adanya dokumen dan bukti dukung ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak terkait berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, mendukung pelaksanaan SPBE secara efektif dan terintegrasi.

- Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, aspek Penyelenggara SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan aspek Penyelenggara SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum memiliki Tim Kolaborasi SPBE yang terstruktur dengan jelas. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara belum terpenuhi dengan optimal. Hal ini disebabkan karena seluruh pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini seharusnya mengacu dan memiliki keselarasan dengan Peta Rencana SPBE. Namun, Peta Rencana SPBE tersebut belum dimiliki oleh kabupaten Morowali Utara, sehingga proses penerapan manajemen SPBE belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal. Hal ini disebabkan karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan manajemen SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum menerapkan kesesuaian dan keselarasan antara Peta Rencana SPBE dengan penerapan berbagai aspek manajemen, seperti Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Hal ini terlihat dari tidak adanya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini belum menunjukkan proses yang jelas dan keterlaksanaannya. Akibatnya, belum ada dokumen audit yang menjadi dasar untuk proses pengembangan SPBE ke depan.

- Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum menunjukkan kekuatan yang signifikan, karena semua indikator pada aspek ini masih belum sesuai dengan

kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum menerapkan dan melaksanakan proses audit terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap pelaksanaan proses tersebut, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah memenuhi penerapan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan-layanan yang sudah diterapkan meliputi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Penerapan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efisien dan terintegrasi.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa layanan yang telah diterapkan dengan baik, antara lain Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Kinerja Pegawai. Layanan-layanan tersebut menjadi kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Kabupaten Morowali Utara. Semua bukti dukung penerapan dan pelaksanaan layanan tersebut telah memberikan penjelasan yang kuat dan rinci mengenai pemanfaatan serta penggunaan layanan yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak memiliki kelemahan signifikan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua proses dan pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020, sehingga penerapannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara meliputi Layanan Publik Sektor 2. Layanan yang dibuat adalah aplikasi SIMGOS yang merupakan layanan publik sektor kesehatan (Rumah sakit). Saat ini layanan tersebut sudah tersedia dan sudah menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

- Kekuatan

Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dapat terlihat adanya berbagai layanan yang telah diterapkan dengan baik, seperti Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Layanan Publik di berbagai sektor. Layanan Publik Sektor 1 memanfaatkan aplikasi SIDIA dan SIAK, Sektor 2 menggunakan aplikasi SIMGOS, dan Sektor 3 mengandalkan aplikasi OSS. Layanan-layanan ini menjadi kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Kabupaten Morowali Utara. Semua bukti dukung penerapan dan pelaksanaan layanan telah memberikan penjelasan yang kuat dan detail mengenai pemanfaatan serta penggunaan layanan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

- Kelemahan

Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan proses Layanan Data Terbuka. Saat ini layanan tersebut belum tersedia dan belum menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, Tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, masih menggambarkan predikat CUKUP dalam penerapan SPBE, namun terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa layanan yang telah diterapkan dengan baik, antara lain Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Layanan-layanan tersebut menjadi kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Kabupaten Morowali Utara. Semua bukti dukung penerapan dan pelaksanaan layanan tersebut telah memberikan penjelasan yang kuat dan rinci mengenai pemanfaatan serta penggunaan layanan yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek manajemen SPBE dimana Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum memiliki Penerapan Manajemen dan Audit TIK. Hal ini tercermin dari belum adanya penerapan Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Kompetensi SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Layanan, Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Pelaksanaan Audit Keamanan.

Pada beberapa Aspek berikut perlu menjadi perhatian untuk dapat ditingkatkan dan menjadi Fokus dalam pengembangan Penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Manajemen SPBE. Kemudian Aspek Audit TIK dalam hal audit infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan SPBE. Perlu adanya Kerjasama dan Kolaborasi bersama BRIN dan BSSN dalam memperkuat proses Audit TIK yang saat ini belum berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dengan Audit TIK yang terlaksana memberikan gambaran kondisi dan status penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Siangi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. R.A Kartini No 80 (Kompleks Kantor Dinas PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN)-Palu
Telp. (0451) 422 196. Fax (0451) 423 039. Email: Komisiinformasisulteng1@gmail.com

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 51/KEP/KI-SLTG/XII/2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	PERIODE PENILAIAN		
		NILAI	KLASIFIKASI	PERINGKAT
1	KOTA PALU	15	TIDAK INFORMATIF	
2	KABUPATEN SIGI	15	TIDAK INFORMATIF	
3	KABUPATEN DONGGALA	26	TIDAK INFORMATIF	
4	KABUPATEN TOLI-TOLI	84	MENUJU INFORMATIF	KEDUA
5	KABUPATEN BUOL	39	TIDAK INFORMATIF	
6	KABUPATEN MOROWALI	20	TIDAK INFORMATIF	
7	KABUPATEN MOROWALI UTARA	64	CUKUP INFORMATIF	KETIGA
8	KABUPATEN BANGGAI	91	INFORMATIF	PERTAMA
9	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	49	KURANG INFORMATIF	
10	KABUPATEN BANGGAI LAUT	50	KURANG INFORMATIF	
11	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	15	TIDAK INFORMATIF	
12	KABUPATEN POSO	15	TIDAK INFORMATIF	
13	KABUPATEN TOJO UNA UNA	61	CUKUP INFORMATIF	KEEMPAT

Palu, 2 Desember 2024

KOMISI INFORMASI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA

H. ABBAH H.A RAHIM, SH., MED